

**PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH,
BELANJA DAERAH TERHADAP *INTERNET FINANCIAL REPORTING*
(Studi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Periode 2015-2018)**

**THE EFFECT OF LOCAL GOVERNMENT SIZE, REGIONAL REVENUE,
REGIONAL EXPENDITURE TO *INTERNET FINANCIAL REPORTING* (Study of
Regency / City Governments in East Java Province 2015-2018 Period)**

Indriani Azis¹, Dini Wahjoe Hapsari, SE.,M.Si.,Ak.,CA.²

^{1,2}Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

¹indrianiaziss@student.telkomuniversity.ac.id, ²dinihapsari@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan belanja daerah terhadap *internet financial reporting* pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Variabel dependen dalam penelitian ini *internet financial reporting*. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2018 dan jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan aplikasi *Eviews* untuk menganalisis data dan metode analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah berpengaruh secara simultan terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018. Secara parsial ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif sedangkan pendapatan asli daerah, dan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018

Kata kunci: Ukuran pemerintah daerah, Pendapatan asli daerah, Belanja daerah, *Internet financial reporting*

Abstract

This study aims to examine the effect of local government size, regional revenue, and regional expenditure on the internet financial reporting of regency / city governments in East Java Province. The dependent variable in this study is internet financial reporting. The independent variable is the size of the regional government, regional revenue and regional expenditure. The population used in this study were all regencies / cities in the Province of East Java in the 2015-2018 period and the total population used in this study were 38 regencies / cities in the province of East Java. The sampling technique used in this study was purposive sampling. This research uses quantitative analysis techniques using descriptive statistics. This study also uses the Eviews application to analyze data and panel data regression analysis methods. The results showed that the size of the local government, regional revenue, regional spending simultaneously affected the Internet Financial Reporting on regional governments in East Java Province in 2015-2018. Partially, the size of the local government has a significant positive effect while the original regional revenue and regional expenditure do not affect the internet financial reporting of the regency / city government in East Java Province in 2015-2018.

Keywords: Size Of Local Government, Regional Revenue, Regional Expenditure, *Internet financial reporting*

1. Pendahuluan

Sektor publik merupakan sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat, pemerintah harus transparansi kepada masyarakat agar tidak menimbulkan pertanyaan. Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah [1]. Pemerintah telah mengeluarkan instruksi tentang strategi dan kebijakan *e-government* melalui instruksi Presiden RI No 3 tahun 2003, pemerintah harus memanfaatkan teknologi yang telah tersedia dengan melaksanakan proses transformasi menuju *e-government* atau sekarang dikenalnya sebagai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Perpres No 95 tahun 2018. SPBE bertujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang transparansi dan akuntabilitas. *E-government* atau SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik yang efektif dan efisien. Jaringan informasi dan pelayanan publik ini dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat luas serta dapat dijangkau atau diakses di seluruh Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh waktu.

Pengungkapan atau pelaporan akuntansi yang dilakukan oleh sektor publik atau pemerintahan melalui *website* pemerintah adalah fitur yang disebut pelaporan keuangan internet (*Internet Financial Reporting*). IFR yaitu kombinasi dari kapasitas multimedia dan kemampuan internet untuk menginformasikan keuangan secara interaktif [2].

Ukuran pemerintah daerah diukur dari total aset setiap daerah. Pemerintah daerah yang memiliki total aset yang besar cenderung memiliki keuangan yang kompleks, sehingga mendapatkan pengawasan yang lebih. Ukuran pemerintah daerah yang besar dapat mendorong adanya pengungkapan informasi keuangan dari pemerintah melalui *internet*, untuk memenuhi pengawasan dan pelaporan agar tidak terjadi asimetri antara masyarakat dan pemerintah [3].

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan pada suatu daerah untuk memenuhi belanja suatu daerah.

Belanja daerah digunakan untuk memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat daerah dengan berbagai saran dan prasaranan yang dibutuhkan publik. Pemerintah daerah yang memiliki belanja daerah yang tinggi akan menunjukkan kepada publik bagaimana hasil kinerja mereka. Pengungkapan informasi kepada publik akan lebih mudah dengan menerapkan *e-government*. Belanja daerah dapat diukur dari total belanja daerah. Belanja daerah digunakan untuk mensejahterakan masyarakat daerah, dimana semakin tinggi belanja daerah menunjukkan bahwa anggaran pemerintah digunakan untuk kepentingan publik artinya keinginan pemerintah untuk memberikan informasi kepada masyarakat juga semakin tinggi dan masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang baik dengan meningkatnya pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah [4].

2. Dasar Teori dan Kerangka Pemikiran

2.1 Dasar Teori

2.1.1 *Internet Financial Reporting*

IFR merupakan pengungkapan dan pelaporan keuangan sektor publik dengan menggunakan situs web pemerintah (*e-government*). IFR dalam sektor swasta dan sektor publik memiliki tujuan yang sama dengan menggunakan media internet untuk mengungkapkan dan menyebarkan laporan keuangan yang diberikan kepada para pemangku kepentingan publik. Informasi keuangan yang diberikan melalui internet mencakup laporan keuangan yang lengkap [2].

Tabel 2. 1 Indeks Aksesibilitass Internet Financial Reporting

Poin	Skor	Syarat
A	+1	Jika <i>website</i> resmi pemerintah daerah dapat ditemukan pada halaman pertama pencarian <i>google</i> atau <i>yahoo</i> dengan mengetik nama pemerintah daerah
B	+1	Jika terdapat <i>link</i> data informasi keuangan pada halaman depan (<i>home website</i>)
C	+1	Jika terdapat <i>search engine</i> untuk melakukan pencarian informasi keuangan
D	+1	Jika hanya diperlukan tiga kali klik atau kurang untuk melihat <i>Internet Financial Reporting (IFR)</i> dalam <i>website</i> pemerintah daerah
E	+1	Jika <i>Internet Financial Reporting (IFR)</i> dapat diunduh dalam format PDF atau HTML
F	+1	Jika ukuran <i>file</i> laporan keuangan yang diunduh kurang dari 3 MB
G	+1	Jika terdapat data <i>Internet Financial Reporting</i> tahun sebelumnya dalam <i>website</i> pemerintah daerah
H	+2	Jika terdapat komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) lengkap seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, LAK, CALK, dan APBD
I	+1	Jika terdapat informasi <i>contact person</i> seperti telepon/fax/email untuk mendapatkan data informasi keuangan
Catatan: 1. Kalkulasi nilai indeks berdasarkan hasil pencarian IFR sesuai tanggal akses <i>website</i> Pemda lakukan 2. <i>Internet Financial Reporting</i> dalam hal ini yaitu laporan keuangan pemda yang telah diaudit BPK seperti: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan CALK (catatan atas laporan keuangan) tahun anggaran 2015-2018 3. Data <i>Internet Financial Reporting (IFR)</i> tahun sebelumnya yang dimaksud adalah tahun anggaran 2015 Jika memenuhi syarat ditambahkan sesuai skor, jika tidak memenuhi = 0		

Sumber : (Irine, Gideon, & Indrawati, 2017), data diolah penulis (2020)

2.1.2 Ukuran Pemerintah

Ukuran pemerintah adalah jumlah aset yang dimiliki pemerintah. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki, semakin besar juga ukuran pemerintah. Ukuran organisasi menunjukkan besarnya suatu organisasi begitu juga dengan ukuran pemerintah yang menunjukkan seberapa besar ukuran pemerintah daerah tersebut. Untuk menilai ukuran pada suatu organisasi atau pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya total aset. Ukuran daerah atau total aset yang besar pada suatu daerah akan memiliki kewajiban dan tuntunan yang besar pula dalam melaporkan pengungkapan kepada publik [5].

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{Ln} (\text{Total Aset Pemda})$$

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah yang telah diatur berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2004, pendapatan daerah merupakan semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan daerah dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pendapatan asli daerah memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan pemerintah daerah dalam hal mendanai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi daerah dalam mewujudkan desentralisasi. Pendapatan asli daerah yang disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh suatu daerah berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

$$\text{Rasio PAD} = \left(\frac{\text{total PAD}}{\text{total pendapatan}} \right) \times 100\%$$

2.1.4 Belanja Daerah

Belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan merupakan pengeluaran diperoleh dari rekening kas umum daerah yang pemerintah daerah tidak perlu menerima kembali dan pengeluaran-pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan aturan perundangan dan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.

$$\text{Belanja daerah} = \text{Ln} (\text{Total Belanja Daerah})$$

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap *internet financial reporting*

Ukuran pemerintah daerah adalah jumlah aset yang dimiliki pemerintah. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki semakin besar juga ukuran pemerintah daerah [6]. *Internet financial reporting* suatu cara yang dilakukan untuk mencantumkan laporan keuangan melalui internet [7]. Ukuran pemerintah daerah yang besar akan mendorong pemerintah untuk mengungkapkan laporan keuangannya. Pemerintah dengan ukuran yang besar memiliki kekayaan yang besar. Jika kekayaan dalam pemerintahan besar maka akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat yang besar sehingga pemerintah harus menanggung biaya pengawasan yang lebih tinggi [3].

H_{a1}: Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting*.

2.2.2. Pengaruh pendapatan asli daerah terhadap *internet financial reporting*

Pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan dalam memenuhi belanja pada suatu daerah. Pendapatan asli daerah digunakan untuk mengukur kinerja pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memiliki pendapatan yang tinggi menunjukkan kinerja yang telah dicapai pada suatu daerah sudah baik. *Internet financial reporting* suatu cara yang dilakukan untuk mencantumkan laporan keuangan melalui internet [7]. Kinerja yang baik dalam mengelola keuangan pada suatu pemerintah akan melakukan pengungkapan dan penyampaian informasi semakin tinggi kepada masyarakat atau publik dengan menggunakan teknik penyampaian yang lebih baik, tujuannya agar masyarakat dapat mendukung terus perkembangan kinerja pemerintah agar kegiatan yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan baik dan masyarakat juga mengetahui kekayaan daerahnya yang dikelola oleh pemerintah daerah. Sebaliknya jika kinerja yang buruk pada pemerintah daerah akan membatasi akses informasi-informasi untuk masyarakat [8].

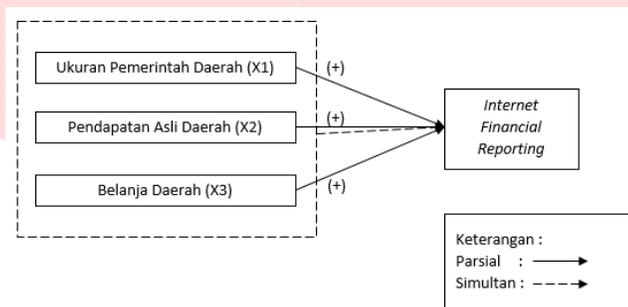
H_{a2}: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting*.

2.2.3. Pengaruh belanja daerah terhadap *internet financial reporting*

Belanja daerah digunakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Peningkatan kualitas tersebut terdiri dari peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Pengungkapan laporan keuangan dapat dilakukan melalui internet sehingga data yang didapat lebih lengkap dan tidak memerlukan biaya yang banyak dengan menggunakan *website* pemerintah, pengungkapan ini agar tidak terjadi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat [3]. semakin tinggi belanja

pada suatu daerah maka pemerintah akan meningkatkan pengungkapan laporan keuangan di *website* pemerintah daerah [9].

H_{a3} : Belanja daerah berpengaruh positif terhadap *internet financial reporting*.



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian
Sumber: Data yang telah diolah (2020)

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu kuantitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2015-2018 dan jumlah populasi yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder penelitian ini berupa laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur selama 2015-2018 yang ada pada *website* resmi pemda. Total sampel yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini sebanyak 8 Kabupaten/Kota dengan periode 4 tahun. Sehingga total jumlah observasi data yang diperoleh sebanyak 32. Daftar sampel penelitian yang telah diperoleh berdasarkan kriteria terdiri 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah *purposive sampling*. Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif menggunakan statistik deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan aplikasi *Eviews* untuk menganalisis data dan metode analisis regresi data panel. Berikut model analisis regresi data panel dalam penelitian ini.

$$Y = \alpha + \beta_1 UKURAN_{it} + \beta_2 PAD_{it} + \beta_3 BELANJA_{it} + e$$

Keterangan :

- Y = *Internet financial reporting*
- α = Konstanta
- Ukuran = Ukuran pemerintah daerah
- PAD = Pendapatan asli daerah
- Belanja = Belanja daerah
- $\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- e = *Error term*
- t = Waktu
- i = Perusahaan

4. Hasil penelitian dan Pembahasan

4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berikut adalah hasil uji statistik deskriptif *internet financial reporting*, ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah.

Tabel 4. 1 Analisis Statistik Deskriptif

Variabel	Observation	Max	Min	Mean	Std. Deviasi
Ukuran pemerintah daerah (X1)	32	31.3867	27.8297	29.0702	0.9662
Pendapatan asli daerah (X2)	32	0.6425	0.0915	0.2255	0.1676

Belanja daerah (X3)	32	29.7323	23.5475	28.1316	1.0324
Internet financial reporting (Y)	32	10	3	6.9375	2.2992

Sumber: Data yang telah diolah 2020

Hasil pengujian diatas yang terdapat pada Tabel 4.1. Menunjukkan bahwa:

1. Ukuran pemerintah daerah memiliki rata-rata (*mean*) sebesar 29.0702 sedangkan nilai standar deviasinya sebesar 0.9662 artinya standar deviasi lebih kecil dari mean, sehingga data tersebut tidak bervariasi atau data berkelompok.
2. Pendapatan asli daerah yang memiliki rata-rata 0.2255 dan standar deviasinya 0.1676. Standar deviasi variabel kedua ini memiliki nilai lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata, sehingga data tersebut tidak bervariasi atau data berkelompok.
3. Belanja daerah dengan nilai rata-rata 28.1316 dan standar deviasi 1.0324, artinya nilai standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata sehingga data tersebut tidak bervariasi atau data berkelompok.
4. *Internet financial reporting* yang dihitung menggunakan *Calculatin of Accesibility Index Value* yang memiliki standar deviasi sebesar 2.2992 dan nilai mean sebesar 6.9375 Standar deviasi lebih kecil dibandingkan nilai rata-rata yang berarti data tersebut tidak bervariasi atau berkelompok.

4.2 Uji Data Panel

Hasil pengujian tiga model yang telah dilakukan, maka model yang tepat dalam penelitian ini yaitu model random effect.

Tabel 4. 2 Hasil Uji Signifikan Random Effect Model

Dependent Variable: IFR				
Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)				
Date: 08/11/20 Time: 11:42				
Sample: 2015 2018				
Periods included: 4				
Cross-sections included: 8				
Total panel (balanced) observations: 32				
Swamy and Arora estimator of component variances				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-92.92587	39.17771	-2.371906	0.0248
UKURAN	3.455652	1.199462	2.881002	0.0075
PAD	-11.95480	7.585611	-1.575984	0.1263
BELANJA	0.074725	0.307246	0.243210	0.8096
Effects Specification			S.D.	Rho
Cross-section random			2.883306	0.9525
Idiosyncratic random			0.643578	0.0475
Weighted Statistics				
R-squared	0.298996	Mean dependent var	0.769477	
Adjusted R-squared	0.223889	S.D. dependent var	0.736853	
S.E. of regression	0.649146	Sum squared resid	11.79894	
F-statistic	3.980913	Durbin-Watson stat	2.333369	
Prob(F-statistic)	0.017601			
Unweighted Statistics				
R-squared	-0.343915	Mean dependent var	6.937500	
Sum squared resid	220.2341	Durbin-Watson stat	0.125009	

Sumber : data sekunder yang diolah penulis (2020).

Persamaan regresi data panel dapat dirumuskan berdasarkan tabel 4.11 sebagai berikut.

$$IFR = -92.92587 + 3.455652 \text{ UKURAN} - 11.95480 \text{ PAD} + 0.074725 \text{ BELANJA} + e$$

Persamaan regresi dapat diartikan:

- Nilai konstanta sebesar -92.92587 menunjukkan bahwa variabel independen pada regresi yaitu ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah bernilai nol, maka nilai variabel *internet financial reporting* sebesar -92.92587 satuan.
- Koefisien regresi ukuran pemerintah daerah sebesar 3.455652 sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka *Internet financial reporting* akan meningkat sebesar 3.455652 satuan. Hal ini menunjukkan ketika ukuran pemerintah daerah meningkat maka *internet financial reporting* akan meningkat.
- Koefisien regresi pendapatan asli daerah sebesar -11.95480 sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka *Internet financial reporting* akan menurun sebesar -11.95480 satuan. Hal ini menunjukkan ketika pendapatan asli daerah meningkat maka *internet financial reporting* akan menurun.
- Koefisien regresi belanja daerah sebesar 0.074725 sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai nol, maka *Internet financial reporting* akan meningkat sebesar 0.074725 satuan. Hal ini menunjukkan ketika belanja daerah meningkat maka *internet financial reporting* akan meningkat.
- Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan, *internet financial reporting* sebesar -92.92587 akan bertambah sebesar 3.455652 satuan apabila terjadi perubahan terhadap ukuran pemerintah daerah, akan berkurang sebesar -11.95480 satuan apabila terjadi perubahan pendapatan asli daerah, dan akan bertambah sebesar 0.074725 satuan apabila terjadi perubahan terhadap belanja daerah.

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1. Uji Koefisien Determinasi R²

Berdasarkan tabel 4.2 diketahui nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0.223889 apabila diukur dengan persentase yaitu sebesar 22,3889% maka dapat disimpulkan bahwa ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah mampu menjelaskan *internet financial reporting* sebesar 22,3889% dan sisanya 77,6111% dipengaruhi oleh faktor lain atau variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.3.2. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Berdasarkan tabel 4.2 nilai *prob (F-statistic)* adalah 0.017601 atau lebih kecil dari 5% yang menunjukkan variabel independen ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah berpengaruh secara simultan atau berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu *Internet financial Reporting*.

4.3.3. Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Nilai *prob* ukuran pemerintah daerah sebesar 0.0075. Nilai *prob* ukuran pemerintah daerah menunjukkan 0.0075 < 0.05 dengan koefisien regresi yang bernilai positif, maka ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap *internet financial reporting*.
- Nilai *prob* pendapatan asli daerah sebesar 0.1263. Nilai tersebut menunjukkan 0.1263 > 0.05 dengan koefisien regresi bernilai negatif sehingga pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*.
- Nilai *prob* belanja daerah sebesar 0.8096. Nilai tersebut menunjukkan 0.8096 > 0.05 dengan koefisien regresi bernilai positif sehingga belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting*.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*

Berdasarkan hasil pengujian simultan tabel 4.2 menunjukkan nilai *prob (F-statistic)* adalah 0.017601 atau lebih kecil dari 0,05 artinya variabel independen terdiri dari ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu *internet financial reporting* pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018. Nilai *Adjusted R-Squared* 0,223889 atau 22,3889% menjelaskan bahwa variabel independen ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah mampu berkontribusi atau menjelaskan variabel dependen yaitu *internet financial reporting* yang dihitung dengan *Calculation of Accesibility Index Value* sebesar 22,3889% sedangkan sisanya 77,6111% dipengaruhi oleh variabel lain.

4.4.2 Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*

Hasil pengujian pada tabel 4.2 nilai *prob* 0.0075 yang lebih kecil dari 0.05 yang berarti ukuran pemerintah daerah berpengaruh secara parsial terhadap *Internet Financial Reporting* pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018. Koefisien regresi ukuran pemerintah sebesar 3.455652 artinya memiliki arah positif terhadap *internet financial reporting* yaitu ketika ukuran pemerintah daerah meningkat maka *internet financial reporting* akan meningkat. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang dibuat, bahwa ukuran pemerintah berpengaruh terhadap *internet financial reporting*.

4.4.3 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*

Hasil regresi pada tabel 4.11 nilai *prob* sebesar 0.1263 menunjukkan jika nilai *prob* lebih besar dari 0.05 artinya pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* pada pemerintahan daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat, bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

4.4.4 Pengaruh Belanja Daerah terhadap *Internet Financial Reporting*

Hasil regresi pada tabel 4.1 nilai *prob* sebesar 0.8096 menunjukkan jika nilai *prob* lebih besar dari 0.05 artinya belanja daerah tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* pada pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dibuat, bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting*.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah terhadap *internet financial reporting* pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2018. Penelitian ini dilakukan dengan sampel 8 Kota/Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa.

1. Berdasarkan pengujian analisis deskriptif, dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Ukuran pemerintah daerah memiliki rata-rata (mean) sebesar 29.0702 dan nilai standar deviasinya sebesar 0.9662. Nilai minimum dimiliki oleh Kota Batu pada tahun 2015 sebesar 27,8297 dan nilai maksimumnya dimiliki oleh Kab. Surabaya pada tahun 2018 sebesar 31,3867.
 - b. Pendapatan asli daerah yang memiliki rata-rata 0.2255 dan standar deviasinya 0.1676. Nilai minimum variabel pendapatan asli daerah dimiliki oleh Kab. Blitar dengan nilai 0.0915 tahun 2015 dan nilai maksimumnya 0,6425 dimiliki oleh Kota Surabaya tahun 2017.
 - c. Belanja daerah dengan nilai rata-rata 28.1316 dan standar deviasi 1.0324. Nilai minimum dimiliki oleh Kota Malang dengan nilai 23.5475 tahun 2015 dan nilai maksimum 29,7323 dimiliki oleh Kota Surabaya tahun 2018.
 - d. *Internet financial reporting* memiliki standar deviasi sebesar 2.2412 dan nilai mean sebesar 7.4063. *Internet financial reporting* memiliki nilai minimum sebesar 4 dan nilai maksimum sebesar 10.
2. Berdasarkan pengujian simultan, ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, belanja daerah berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting* pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2016.
3. Berdasarkan pengujian secara parsial:
 - a. Ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan positif terhadap *internet financial reporting* pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018.
 - b. Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018.
 - c. Belanja daerah tidak berpengaruh terhadap *internet financial reporting* pada pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015-2018.

5.2 Saran

5.2.1 Aspek Teoritis

1. Bagi akademik dapat menambah referensi dalam bidang akuntansi dan sektor publik mengenai apa saja yang dapat mempengaruhi *internet financial reporting* pada *website* pemerintah di Indonesia.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat meneliti Provinsi di Indonesia selain Provinsi Jawa Timur sebagai sampel dan menambah variabel-variabel lain agar lebih mengetahui tingkat *internet financial reporting* pada *website* pemerintah di Indonesia.

5.2.2 Aspek Praktis

1. Bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur harus lebih meningkatkan lagi dalam hal transparansi terlebih pada pengungkapan laporan keuangan, karena masih banyak kabupaten/kota yang tidak melakukan pengungkapan laporan keuangan pada *website* sedangkan pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan mengenai pengungkapan informasi pemerintah daerah melalui media yang mudah dan murah untuk diakses, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun investor.
2. Bagi publik, baik masyarakat, kreditur, dan investor dapat membantu pengawasan dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintah sehingga dapat meningkatkan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sri Mulyani; et al, "Sistem Informasi Akuntansi: Aplikasi Di Sektor Publik: Panduan Praktis Analisis dan Perancangan Implementasi SIA di Sektor Publik," Unpad Press, 2019, p. 277.
- [2] V. "The comparative analysis of accessibility index value of government internet financial reporting in indonesia," 2015.
- [3] K. A. D. Pratama, D. N. S. Werastuti and E. Sujana, "Pengaruh kompleksitas pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, kekayaan daerah dan belanja daerah terhadap laporan keuangan pemerintah daerah," 2015.
- [4] Mutiha, "faktor penentu aksesibilitas internet financial reporting pada e-government pemerintah kota/kabupaten di jawa barat," 2017.
- [5] M. Sukron, *Pengaruh opini audit, ukuran pemerintah daerah, dan kemampuan keuangan daerah terhadap tingkat pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan pada situs resmi pemerintah daerah*, 2018.
- [6] R. Annisa and H. Murtini, *The determinant of regional financial information transparency on the official website of local government*, 2018.
- [7] Verawaty, *Determinan Aksesibilitas Internet Financial Reporting melalui E-Government Pemerintah di Indonesia*, p. 4, 2015.
- [8] Verawaty, *Determinan aksesibilitas internet financial reporting melalui e-government di sumatera bagian selatan*, 2018.
- [9] G. I. Alhajjiriana, W. Nor and R. Wijaya, *Faktor-faktor yang mempengaruhi internet financial reporting pemerintah daerah dan implikasinya terhadap akuntabilitas laporan keuangan daerah*, 2017.
- [10] R. I. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, 2003.
- [11] R. I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 2004.
- [12] R. I. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan, 2019.